



2024

LAKIP

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

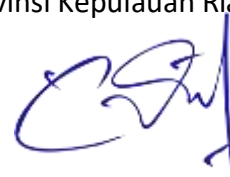
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Rahmat dan Karunia-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan, LKJIP ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjungpinang, 15 Februari 2025
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. ARIES FHARIANDI, S.sos. M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.197904222003121009



IKHTISAR EKSKLUSIF

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau:

1. Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan;
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Indikator Sasaran Strategis, Target, Capaian dan Persentase capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1 - Indikator, Target, Capaian dan Persentase Capaian Strategis

No	Indikator Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	41,13	41,07	99,85
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	8,58	9,25	100
3	Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	100	100	100

Industri pengolahan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan andil kontribusi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tahun 2024 sebesar 41,07 persen dengan nilai total 144.628,95 Milyar Rupiah dari total PDRB senilai 352.436,43 Milyar Rupiah. Selaian sektor industri pengolahan, sektor perdagangan juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi suatu daerah karena perdagangan dan reparasi kendaraan adalah sektor yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sektor perdagangan memberikan andil kontribusi sebesar 9,25 persen dari PDRB dengan nilai total 32.602,64 Milyar Rupiah.

Kontribusi dari kedua sektor ini didukung oleh masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik dari sektor industri pengolahan dan kinerja Perdagangan Besar dan Eceran terakselerasi sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat di momen tahun ajaran baru.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksklusif.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar.....	5
Bab I - Pendahuluan	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	7
1.3. Formasi Kepegawaian.....	10
1.4. Strategi	11
1.5. Dukungan SDM, Sarana – Prasarana Anggaran	12
Bab II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2024	Error! Bookmark not defined.
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	33
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024.....	34
3.3. Analisis Ketercapaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024 .	Error! Bookmark not defined.
3.4. Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
Bab IV - Penutup.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Indikator, Target, Capaian dan Persentase Capaian Strategis.....	2
Tabel 1.2 - Kebutuhan Pegawai Pelaksana	10
Tabel 1.3 - Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi....	12
Tabel 1.4 - Sarana dan Prasarana	14
Tabel 1.5 - Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024.....	14
Tabel 2.1 - Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Bidang Perindustrian dan Perdagangan.....	15
Tabel 2.2 - Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2.3 - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan utama dalam pencapaian sasaran tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung dalam pencapaian sasaran tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 - Perjanjian Kinerja Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau	32
Tabel 2.6 - Jumlah Total Pagu Anggaran Disperindag Tahun 2024 per Program	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 - Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2 - Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	33
Tabel 3.3 - Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program Sasaran Strategis Pertama Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.4 - Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Bagan Struktur Organisasi.....	9
---	---





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangm Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021—2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu perangkat Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2024. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pencapaian kinerja didasarkan kepada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar penetapan target kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Dalam perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan atas dasar mandate yang telah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2024.



Adapun tujuan penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.2. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagai berikut:

1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Hubungan antara mandat kinerja dan struktur organisasi yang diatur didalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dijelaskan pada bagian keempat belas pasal 213 Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tugas

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- f. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang urusan perindustrian dan perdagangan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan perindustrian dan perdagangan;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;



- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2.1.1. Fungsi

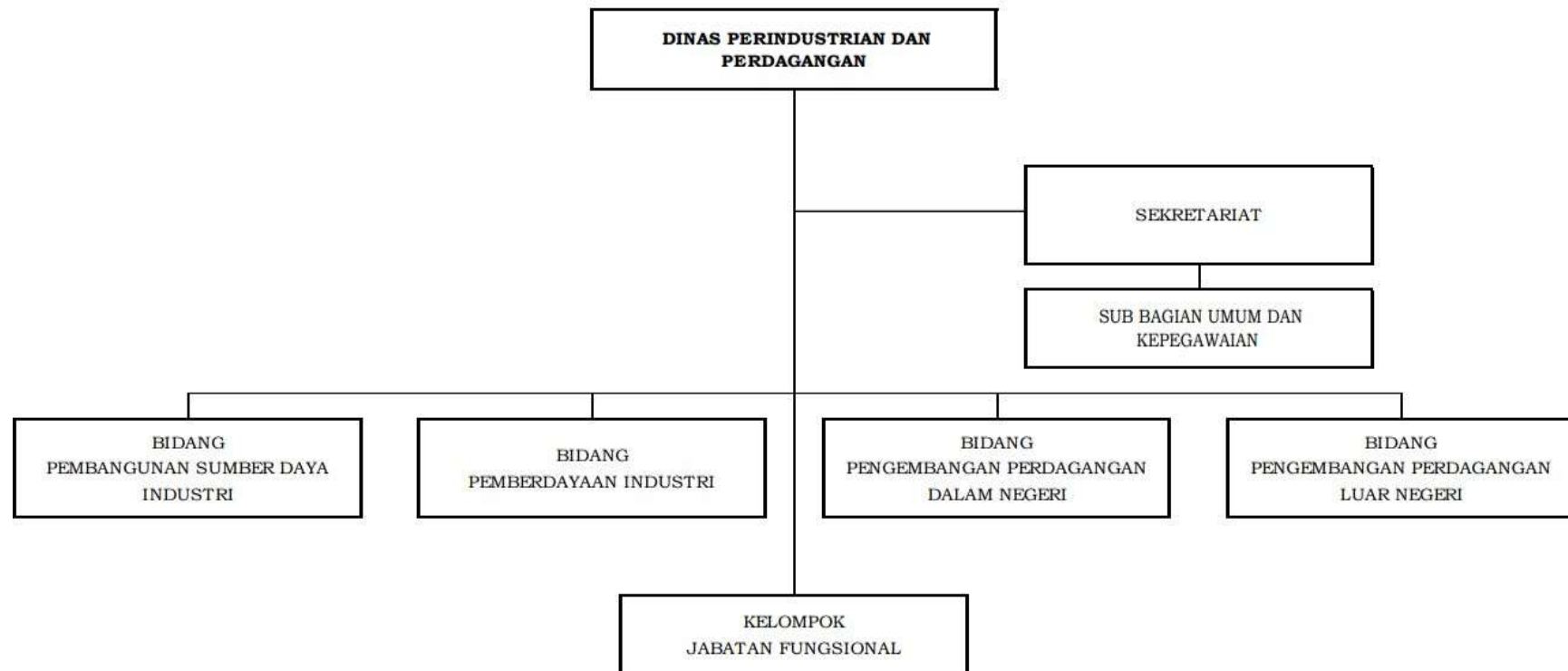
- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1 – Bagan Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



1.3. Formasi Kepegawaian

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari bidang yang di pimpin Kepala Bidang yang membawahi beberapa orang Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diantaranya :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- d. Bidang Pemberdayaan Industri
- e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah kebutuhan Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 1.2 – Kebutuhan Pegawai OPD

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
A	Jabatan Manegerial				
1	Kepala Dinas	1	1	-	S1/D4
2	Sekretaris	1	1	-	S1/D4
3	Kepala Bidang	4	4	-	S1/D4
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	S1/D4
B	Jabatan Fungsional				
1	Pembina Industri Ahli Utama	1	-	1	S1/D4
2	Pembina Industri Ahli Madya	3	2	1	S1/D4
3	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	2	-	2	S1/D4
4	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya	2	-	2	S1/D4
5	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	5	-	5	S1/D4
6	Statistisi Ahli Madya	1	-	1	S1/D4
7	Analisis Perdagangan Ahli Madya	2	-	2	
8	Perencana Ahli Muda	2	2	-	S1/D4
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	1	3	S1/D4
10	Arsiparis Ahli Muda	1	-	1	S1/D4
11	Statistisi Ahli Muda	1	-	1	S1/D4
12	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	10	2	8	S1/D4
13	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	1	-	1	S1/D4
14	Pembina Industri Ahli Muda	6	3	3	S1/D4
15	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	4	3	S1/D4
16	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	4	1	3	S1/D4
17	Perencana Ahli Pertama	3	3	-	S1/D4
18	Arsiparis Ahli Pertama	2	-	2	S1/D4
19	Statistisi Ahli Pertama	2	-	2	S1/D4
20	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	1	-	1	S1/D4

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
21	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	10	-	10	S1/D4
22	Pembina Industri Ahli Pertama	7	3	4	S1/D4
23	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	7	1	6	S1/D4
24	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	13	3	10	S1/D4
25	Statistisi Penyelia	1	-	1	D3
26	Arsiparis Penyelia	1	-	1	D3
27	Statistisi Mahir	1	-	1	D3
28	Arsiparis Mahir	1	-	1	D3
29	Statistisi Terampil	1	-	1	D3
30	Statistisi Terampil	1	-	1	D3
C	Jabatan Pelaksana				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	6	3	3	S1/D4
2	Pengawas Industri	10	-	10	S1/D4
3	Konsultan Industri	10	-	10	S1/D4
4	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	5	1	4	S1/D4
5	Fasilitator Perdagangan	8	-	8	S1/D4
6	Surveyor Perdagangan	2	-	2	S1/D4
7	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	1	-	1	S1/D4
8	Pengelola Layanan Operasional	4	-	4	D3
9	Pengelola Data dan Informasi	10	2	8	D3
10	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	4	SLTA/D1/D3
	Jumlah	174	40	134	

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal, masih dibutuhkan sebanyak 134 personil berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang sudah disusun.

1.4. Strategi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi", antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.4.2. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan desain kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, dan budaya kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

1.4.3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

1.5. Dukungan SDM, Sarana – Prasarana Anggaran

Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3 – Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S3	1	
2	Sekretaris Dinas	1	S1	1	S2	1	
3	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	S1	1	S2		1
4	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1	S1	1	S1	1	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Industri	1	S1	1	S1		1
6	Kepala Bidang Sumber Daya Industri	1	S1	1	S2	1	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S2		1
B	Jabatan Fungsional						
1	Pembina Industri Ahli Madya	3	S1	2	S2		2
2	Pembina Industri Muda	6	S1	3	S1		3
3	Pembina Industri Pertama	7	S1	3	S1		3
4	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	10	S1	2	S1	1	1
5	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	4	S1	1	S1	1	
6	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	S1	4	S1	1	3
7	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	13	S1	3	S1		3
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	S1	1	S1		1
9	Arsiparis Ahli Muda	1	S1	1	S1		1
10	Perencana Ahli Muda	2	S1	2	S2	1	
					S1	1	
11	Perencana Ahli Pertama	3	S1	3	S1	2	1
C	Jabatan Pelaksana						
1	Penelaah Teknis Kebijakan	6	S1	3	S1		3
2	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	5	S1	1	S1	1	
3	Pengeola Data dan Informasi	10	D3	2	D3		2
4	Pengadministrasi Perkantoran	5	SLTA	1	SLTA	1	
Jumlah		103		40		13	27

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 1 orang (2,5%), D3 2 orang (5%), S1 sebanyak 27 orang (67,5%), dan S2 sebanyak 9 orang (22,5%), dan S3 sebanyak 1 orang (2,5%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 13 orang (32,5%) lebih sedikit dibanding pegawai perempuan sebanyak 27 orang (67,5%). Jabatan struktural berimbang dijabat laki-laki dan perempuan. Pejabat Struktural laki-laki sebanyak 4 orang (57%) dan Pejabat Struktural Perempuan sebanyak 4 orang (43%). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.4 – Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	0 unit	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.357 unit	8.416.608.041,00
3.	Gedung dan Bangunan Jalan	3 unit	137.400.000,00
4.	Irigasi dan Jaringan	2 unit	12.283.800,00
5.	Aset Tetap Lainnya	5 unit	129.134.960,00
6.	Aset Lainnya	0 unit	2.750.000,00
	Total	1.367 unit	8.695.426.801

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasannya sudah didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 1.5 – Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
2023	Rp. 26.197.188.668	Rp. 714.373.289	Rp. 23.918.619.460
2024	Rp. 22.300.369.759	Rp. 56.950.000	Rp. 22.357.319.759

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Terlihat pada tabel 2.4, untuk anggaran tahun 2024 lebih sedikit menurun dari tahun 2023, anggaran tersebut untuk mendukung belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54).

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021–2026.

2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Terkakit RPJMD

Sesuai RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran seperti tabel berikut:

Tabel 2.1 – Sasaran RPJMD Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Basel ine 2023	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	40,07	41,29	41,04	99,78
		Persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	9,06	8,58	9,25	107,81
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100	100

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 – Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Non-Migas terhadap PDRB harga berlaku	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri , proses produksi, kemasan dan pemasaran produk3. Fasilitas Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri.5. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
2	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatkan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor.2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal.3. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan 2024

Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan dalam pencapaian sasaran tahun 2024

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.609.623.057,20 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar Rp17.343.015.268,00 atau sebesar 98,49%. Jumlah indikator program pada urusan Perdagangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Pilihan Perdagangan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
URUSAN PERDAGANGAN							17.609.623.057,20	17.343.015.268,00	98,49	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	15.575.813.768,20	15.314.398.502,00	98,32	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas	Dokumen	6	6	100,00	ST	296.271.942,00	295.120.647,00	99,61	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
	Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	127.060.042,00	126.380.147,00	99,46	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	11.694.100,00	11.694.100,00	100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	157.517.800,00	157.046.400,00	99,70	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100,00	ST	10.757.343.456,00	10.549.430.245,00	98,07	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	100,00	ST	10.308.571.456,00	10.112.778.245,00	98,10	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	448.772.000,00	436.652.000,00	97,30	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	82.205.222,00	82.201.322,00	100,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	105	105	100,00	ST	54.590.000,00	54.590.000,00	100,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	ST	27.615.222,00	27.611.322,00	99,99	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	%	100	100	100,00	ST	1.424.343.719,00	1.412.780.982,00	99,19	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
	Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	376.314.335,00	376.314.335,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	106.169.200,00	100.548.000,00	94,71	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	203.590.000,00	203.082.500,00	99,75	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	613.270.184,00	607.836.147,00	99,11	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	2.762.080.029,20	2.731.590.128,00	98,90	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.632.080.029,20	2.601.590.128,00	98,84	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100,00	ST	253.569.400,00	243.275.178,00	95,94	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100,00	ST	218.469.400,00	209.345.178,00	95,82	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70	100,00	ST	35.100.000,00	33.930.000,00	96,67	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	100	100	100,00	ST	453.597.402,00	453.597.402,00	100,00	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	%	100	100	100,00	ST	453.597.402,00	453.597.402,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	453.597.402,00	453.597.402,00	100,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	< 10	9,08	109,20	ST	143.073.937,00	142.224.537,00	99,41	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu	%	< 10	5,65	143,50	ST	143.073.937,00	142.224.537,00	99,41	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00	ST	57.984.000,00	57.134.600,00	98,54	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	85.089.937,00	85.089.937,00	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	8	8,26	103,25	ST	113.424.868,00	113.424.868,00	100,00	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Fasilitasi Ekspor	%	100	100	100,00	ST	113.424.868,00	113.424.868,00	100,00	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	6	6	100,00	ST	27.868.200,00	27.868.200,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	88	88	100,00	ST	59.708.500,00	59.708.500,00	100,00	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	8	8	100,00	ST	25.848.168,00	25.848.168,00	100,00	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	%	60	82	136,67	ST	846.730.482,00	844.197.779,00	99,70	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	Daerah	2	2	100,00	ST	546.874.116,00	544.341.413,00	99,54	
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	2	2	100,00	ST	546.874.116,00	544.341.413,00	99,54	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Jumlah Barang yang tidak sesuai standar pada saat dilakukan pengawasan	%	< 20	19,5	102,50	ST	299.856.366,00	299.856.366,00	100,00	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	1	100,00	ST	299.856.366,00	299.856.366,00	100,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	70	78,39	111,99	ST	476.982.600,00	475.172.180,00	99,62	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	1	1	100,00	ST	476.982.600,00	475.172.180,00	99,62	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	1	1	100,00	ST	476.982.600,00	475.172.180,00	99,62	

Tabel 2.4 - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan dalam pencapaian sasaran tahun 2024

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Alokasi anggaran untuk Urusan Perindustrian pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.747.696.702,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar Rp4.400.983.649,00 atau sebesar 92,70%. Jumlah indikator program pada urusan Perindustrian sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan pilihan Perindustrian tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD- P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
URUSAN PERINDUSTRIAN							4.747.696.702,00	4.400.983.649,0 0	92,70	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD- P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.671.593.002,00	4.324.879.949,0 0	92,58	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.671.593.002,00	4.324.879.949,0 0	92,58	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	599.989.750,00	599.989.750,00	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	2.915.531.252,00	2.808.126.794,0 0	96,32	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD- P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.116.072.000,00	877.576.158,00	78,63	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.000.000,00	39.187.247,00	97,97	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	76.103.700,00	76.103.700,00	100,00	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Dokumen	1	1	100	ST	76.103.700,00	76.103.700,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD- P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
	Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan	Dokumen	1	1	100	ST	76.103.700,00	76.103.700,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024				Capaian Anggaran Tahun 2024			Ket
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD- P 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran	
	Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi									

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.5 – Perjanjian Kinerja Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	41,29
		Persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	8,58
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 – Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 – Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

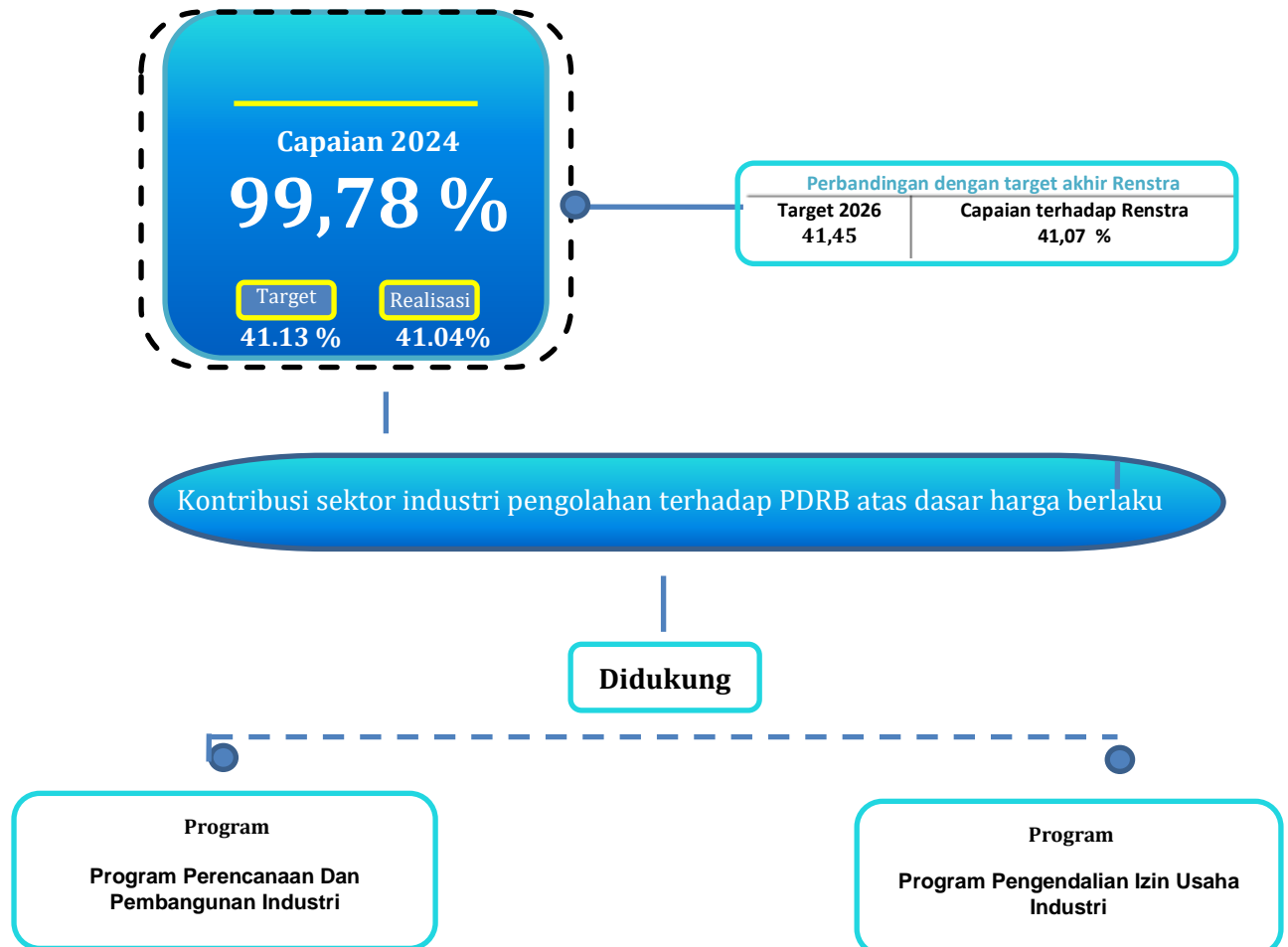
No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Persen	Kode
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,29	41,04	99,78	ST
		Persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,58	9,25	107,81	ST
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100	ST

SASARAN :

Indikator :

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

Capaian kinerja Target Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **99,78 %** sehingga kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.



Formulasi Indikator

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk mengukur seberapa besar nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun perhitungan itu sendiri. Perhitungan ini berfungsi untuk mengetahui kondisi dan kinerja riil sektor industri pada tahun tersebut, yang kemudian dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya untuk melihat perubahannya.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. **Sasaran Strategis 1: Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan**

Kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku diukur dengan indikator nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Sumber data diperoleh dari data nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi kinerja capaian Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 41.13% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 41.04 % sehingga capaian kinerja sebesar 99,78% predikat capaian kategori **baik**

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Sasaran indikator pada tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah Nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan perhitungannya Miliyar Rupiah sehingga sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 41,04% dengan target akhir renstra sebesar 41,45%, sehingga capaian kinerja sebesar 41,07%

d. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada);

Tidak ada informasi terkait Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku standar nasional.

e. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah dengan penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri , proses produksi, kemasan dan pemasaran produk. Memfasilitasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri melalui pendataan Industri kecil dan menengah pada Sisyem Informasi Industri Nasional (SIINas). Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengelola usaha bagi Industri Kecil dan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang berkaitan dengan Industri 4.0. Revitalisasi teknologi produksi Industri Kecil yang masih ketinggalan zaman. Utility seperti listrik, air, bahan bakar/gas dan pengelolaan limbah untuk kawasan-kawasan yang diperkirakan menjadi kawasan baru.

f. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Perindustrian dan Perdagangan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kualitas produk dan kemasan. Pelatihan dan pengembangan penggunaan teknologi serta pengembangan kapasitas SDM pelaku Industri Kecil. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan alat produksi bagi Industri Kecil. Pembaharuan teknologi Industri Kecil dengan pemberian bantuan alat-alat produksi bagi

Industri Kecil. Pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan Industri.

g. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan

Dukungan terhadap indikator Nilai Target kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.671.593.002 realisasi sebesar 92,58% yaitu senilai Rp. 4.324.879.949. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.103.700 dengan realisasi 100%.

h. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

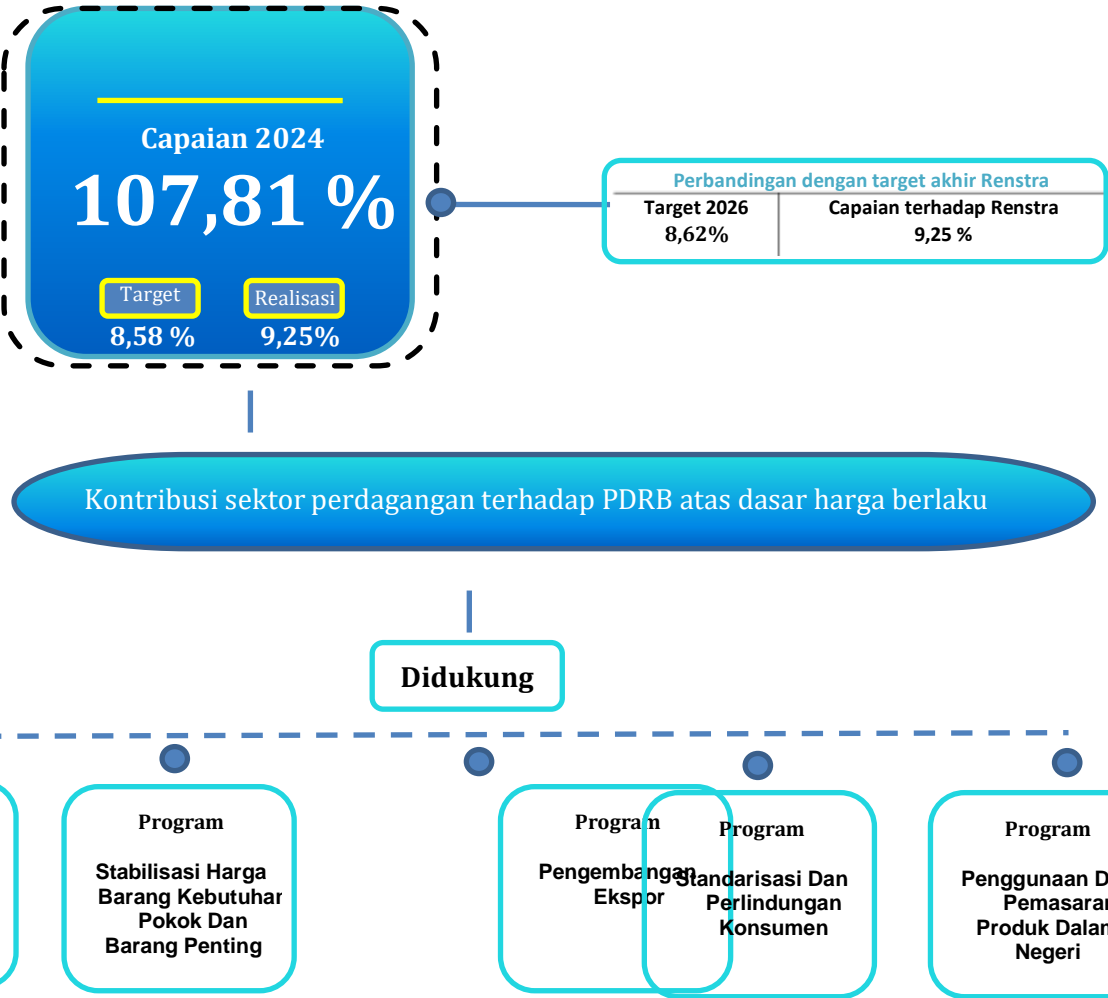
Dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.747.696.702,- terealisasi sebesar Rp 4.400.983.649 ,- atau 92,70%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 346.713.053 (7,30%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (99,78%) lebih tinggi/rendah dari realisasi anggaran (92,70%) sehingga mencapai efisiensi sebesar 7,08 %.

SASARAN :

Indikator :

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

Capaian kinerja Target Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **107,81 %** sehingga kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.



Formulasi Indikator

Salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam PDRB dapat dilihat sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan adalah persentase PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB. Sektor perdagangan yang menjadi kontributor terhadap PDRB: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi kinerja capaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 9,25% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 8,58 % sehingga capaian kinerja sebesar 107,81% predikat capaian kategori **baik**

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Sasaran indikator pada tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan perhitungannya Miliyar Rupiah sehingga sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 9,25% dengan target akhir renstra sebesar 8,62%, sehingga capaian kinerja sebesar 9,25%

d. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada);

Tidak ada informasi terkait Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku standar nasional.

e. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah dengan memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan

pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku antara lain kurangnya pemahaman Pelaku usaha, Distributor, Importir terhadap regulasi Perdagangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang barang yang sesuai regulasi Perdagangan, Kurangnya kerjasama antar Provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok dan kurangnya pemahaman pelaku ekspor terhadap regulasi ekspor impor.

f. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Perindustrian dan Perdagangan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor, penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang local dan enguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

g. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Dukungan terhadap indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menjalankan Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 453.597.402 realisasi sebesar 100%. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 143.073.937 dengan realisasi sebesar Rp. 142.224.537 atau 99,41%.

Program Pengembangan Ekspor pagu anggaran sebesar Rp. 113.424.868 dengan realisasi sebesar 100%. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran Rp. 846.730.482 terealisasi sebesar Rp. 844.197.779 atau 99,70%. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 476.982.600 dengan realisasi sebesar Rp. 475.172.180 atau 99,62%.

h. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

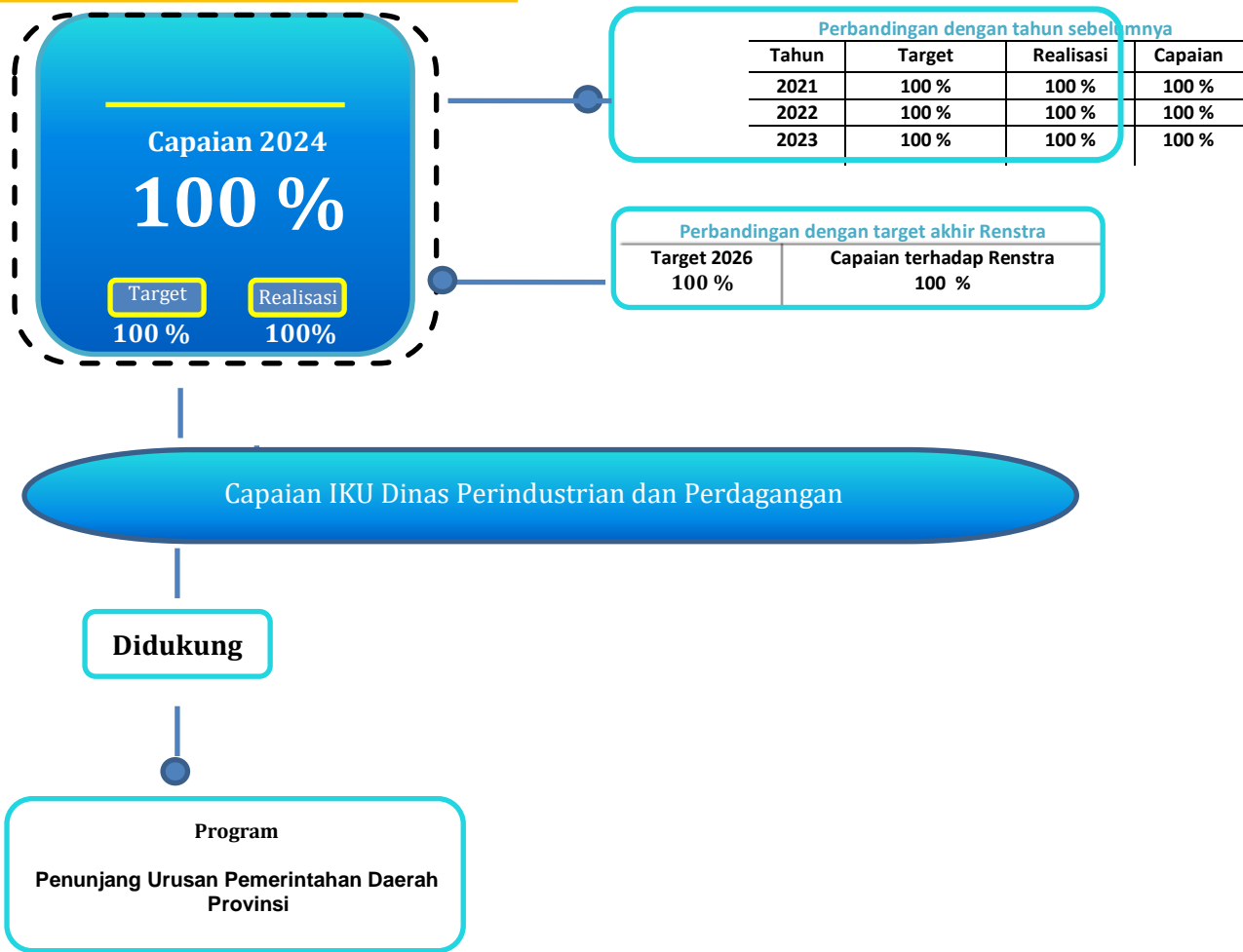
Dari jumlah anggaran sebesar Rp 2.033.809.289,- terealisasi sebesar Rp 2.028.616.766 ,- atau 99,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 5.192.523 (0,26%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (107,81%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,74%).

SASARAN :

Indikator :

Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian kinerja Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 100 % sehingga kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi kinerja Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% predikat capaian kategori **baik**

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Apabila dilihat dari capaian kinerja Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 100%.

c. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

d. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada);

Tidak ada informasi terkait perbandingan Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan standar nasional.

e. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain

f. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Perindustrian dan Perdagangan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara

g. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan

Dukungan terhadap indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.575.813.768,20 realisasi sebesar 98,32% yaitu senilai Rp. 15.314.398.502.

h. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 15.575.813.768,20,- terealisasi sebesar Rp 15.314.398.502,- atau 98,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 261.415.266,20 (1,68%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,32%) sehingga mencapai efisiensi sebesar 1,68 %.



BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut ini:
 - a. Perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk Kepulauan Riau, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai;
 - b. Peningkatan volume barang beredar yang merupakan dampak berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan maraknya perdagangan online belum dimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal;
 - c. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sektor perdagangan masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus sengketa konsumen yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setiap tahunnya;
 - d. Industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di Kepulauan Riau, di era perdagangan bebas ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat sementara mereka memiliki berbagai keterbatasan. Bahan baku IKM tertentu belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain. Kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM Kepulauan Riau yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah;
 - e. Pengembangan IKM Kepulauan Riau didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal.
2. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini :
 - a. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor.
 - b. Meningkatnya permintaan global

- c. Stimulus dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sektor industri.
- d. Penumbuhan dan pengembangan IKM dari pemerintah pusat dilakukan melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
- e. Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
 - a. Mendorong sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai;
 - b. Peningkatan frekuensi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu;
 - c. Peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran BPSK.
 - d. Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing.
 - e. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri serta dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM. Fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan Industri besar dan penyedia modal serta melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi legalitas usaha yang merupakan syarat dalam bermitra dengan penyedia modal.